

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

PANCASILA IDEOLOGI NEGARA MULTIKULTURAL

Muhammad Nuh

IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEUTUHAN NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Zudi Setiawan

**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MISKIN PERKOTAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI ANALISIS
RESPONSIF GENDER KOTA SEMARANG)**

Suharto

**MODEL PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK PADA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA**

Moh. Ali Andreas, Akhmad Satori

**ISU ISLAMOPHOBIA DI AUSTRALIA PADA MASA KEPEMIMPINAN PM
TONY ABBOTT**

Anna Yulia Hartati, Ahmad Hanafi Ash Shiddiq

**INTERREGIONALISME: DUKUNGAN UE TERHADAP MASYARAKAT
ASEAN**

Irwan Iskandar

POPULISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DI INDONESIA

Imelda Masni Juniaty Sianipar

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional adalah media pemikiran bidang Ilmu Politik Hubungan Internasional berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun studi kepustakaan. Terbit pertama kali pada tahun 2004 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli.

Penanggung jawab:

Dekan FISIP UNWAHAS
Andi Purwono, S.IP., M.Si.

Ketua Penyunting:

Zudi Setiawan, S.IP., M.Si.

Sekretaris Penyunting:

Muhammad Nuh, S.Sos., M.Si.

Penyunting Pelaksana:

Agus Riyanto, S.IP., M.Si.
Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A.
Dra. Hj. Ismiyatun, M.Si.
Harun, S.IP., M.Si.

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
Prof. Dr. Mohtar Mas'ood, M.A.
Dr. H. Noor Achmad, M.A.

Tata Usaha:

A. Syihabul Muttaqin
Staf Tata Usaha FISIP UNWAHAS

Alamat Redaksi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236
Telp. (024) 8505680 Fax. (024) 8505680
e-mail: jurnalspektrum@yahoo.co.id

SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional diterbitkan oleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

DAFTAR ISI

PANCASILA IDEOLOGI NEGARA MULTIKULTURAL Muhammad Nuh	4
IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Zudi Setiawan	13
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI ANALISIS RESPONSIF GENDER KOTA SEMARANG) Suharto	21
MODEL PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK PADA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA Moh. Ali Andreas, Akhmad Satori	35
ISU ISLAMOPHOBIA DI AUSTRALIA PADA MASA KEPEMIMPINAN PM TONY ABBOTT Anna Yulia Hartati, Ahmad Hanafi Ash Shiddiq.....	49
INTERREGIONALISME: DUKUNGAN UE TERHADAP MASYARAKAT ASEAN Irwan Iskandar	61
POPULISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DI INDONESIA Imelda Masni Juniaty Sianipar	77

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

SALAM REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Derasnya arus globalisasi di segala bidang kehidupan kita saat ini telah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Di tengah arus perubahan inilah kemudian muncul berbagai persoalan baru di tengah masyarakat. Era reformasi di Indonesia telah memberikan peluang bagi tumbuhnya gerakan-gerakan dengan berbagai varian ideologinya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mendapatkan tantangan serius. Di sisi lain, laju globalisasi juga telah mempengaruhi bagaimana suatu negara harus memainkan peran internasionalnya dalam berhubungan dengan negara-negara lain.

Untuk menjawab persoalan di bidang ilmu politik dan hubungan internasional inilah maka Jurnal SPEKTRUM kembali hadir ke tengah-tengah publik pembaca. Edisi ini mencoba mengetengahkan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan dinamika reformasi di Indonesia serta semakin derasnya arus globalisasi di seluruh dunia.

Redaksi Jurnal SPEKTRUM dalam setiap edisinya terus berupaya meningkatkan kualitas, baik isi maupun format penerbitannya. Tentunya pada edisi-edisi yang akan datang, sajian kami akan terus kami tingkatkan lagi sehingga Jurnal SPEKTRUM ini akan semakin berbobot dalam mengupas masalah-masalah aktual dalam lingkup kajian ilmu politik dan hubungan internasional. Dengan begitu, maka manfaatnya akan dapat dirasakan oleh publik pembaca Jurnal SPEKTRUM. Selamat membaca dan memperkaya khasanah wawasan akademis kita!

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Redaksi

**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
PERKOTAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI ANALISIS RESPONSIF GENDER
KOTA SEMARANG)****Drs. Suharto, M.Si**Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang**Abstraksi**

Peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tergambar bahwa perempuan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan manusia yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang yang cenderung meningkat dari tahun 2009 (76,90) sampai pada tahun 2013 (78.54). Perempuan juga mempunyai kontribusi dalam pembangunan gender yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu cenderung meningkat pada tahun 2009 (71,42) sampai pada tahun 2013 (73.74). Dan kontribusi peran perempuan dalam pemberdayaan gender terlihat dalam capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu menunjukkan kecenderungan meningkat pula pada tahun 2009 (63,19) sedangkan pada tahun 2013 (70.62). Hal ini dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan mempunyai kontribusi yang signifikan dan baik dalam pembangunan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Lebih rinci lagi keterlibatan perempuan dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang menjadi sasaran sekaligus subjek atau pelaku dari pemberdayaan masyarakat. Di Kota Semarang peran perempuan menjadi anggota KSM mencapai 52% lebih tinggi dari target indikator keberhasilan yaitu 30%. Disinilah peran perempuan lebih terlihat dan langsung menjadi tindakan secara nyata dari masyarakat miskin tak berdaya menuju masyarakat berdaya yang sejahtera.

Kata Kunci : Peran Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan.

Pendahuluan

Menilik pada periode Maret 2014, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi sebesar 14,46% dari periode September 2013 sebesar 14,44%. Kenaikan ini disebabkan terjadinya bencana banjir pada awal tahun 2014 yang mengakibatkan meningkatnya harga beras akibat penurunan produksi padi akibat gagal panen dan meningkatnya harga-harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat akibat kenaikan inflasi dampak tersendatnya distribusi. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah periode Maret 2014 sebanyak 4,836 juta orang (14,46%), mengalami kenaikan sebanyak 25,11 ribu orang (0,02%) dibandingkan periode September 2013 sebanyak 4.811 juta orang (14,44%). Kenaikan kemiskinan berada di daerah perkotaan sebanyak 32,21 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan justru mengalami penurunan sebanyak 7,09 ribu orang. Distribusi jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2013 sebagian besar berada di daerah perdesaan (59,78%), menurun dibanding periode September 2013 (60,24%). Capaian persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada periode Maret 2014 sebesar 14,46% ini masih berada di atas Nasional 11,25%.

Berdasarkan basis data terpadu PPLS 2011, saat ini di Jawa Tengah terdapat 50 kecamatan (di 15 kabupaten) dengan tingkat kemiskinan tinggi, 234 kecamatan (di 27 kabupaten) dengan tingkat kemiskinan sedang, dan 289 kecamatan (di 30 kabupaten/kota). Dari total 8.578 desa/kelurahan di Jawa Tengah, terdapat 1.479 desa/kelurahan (terdiri dari 1.356 desa dan 123 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan tinggi, 2.235 desa/kelurahan (terdiri dari 2.080 desa dan 155 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan sedang, dan 4.864 desa/kelurahan (terdiri dari 4.373 desa dan 491 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan rendah. (*sumber : paparan Kepala Bappeda Jateng pada workshop Peningkatan Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, Semarang 26 Agustus 2014*).

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat perlu adanya kesamaan pandang untuk *kesetaraan gender* ini. Karena dalam pemberdayaan masyarakat sasaran utama adalah masyarakat yang tidak berdaya (miskin) dalam arti luas dan secara nyata sebagian besar yang miskin adalah perempuan. Maka dalam program pemberdayaan masyarakat (penanggulangan kemiskinan) selalu didorong untuk sensitive gender dan lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran perempuan. Secara umum pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia & warga Negara. Untuk dapat memulihkan kembali harkat dan martabat komunitas (warga miskin), pentingnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu program penanggulangan kemiskinan yang sekarang baru gencar-gencarnya digalakkan Pemerintah.

Dengan demikian untuk mengetahui sejauhmana peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin diperkotaan, maka perlu adanya studi yang menganalisis responsive gender terhadap program pemberdayaan masyarakat (program penanggulangan kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan

Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sebenarnya sudah sejak lama dimulai, secara eksplisit dengan gencarnya dilaksanakan ketika lembaga Kementerian Peranan Wanita didirikan secara resmi akhir tahun 1970-an. Realitasnya tidak dapat dipungkiri bahwa peran kaum perempuan dalam pembangunan sedemikian besarnya, ikut serta menentukan arah dan keberhasilan pembangunan nasional Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Saul M Katz (1971) bahwa pembangunan adalah *mayor societal change from one state of national being to another, more valued state*, adanya perubahan besar-besaran suatu bangsa dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Sejalan dengan itu pandangan Coralie Bryant dan Louise White, dalam *Managing Development in the Third World* mengemukakan bahwa pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Tentu dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan keterlibatan semua pihak tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Sehingga Karls (1995) memandang bahwa pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan kaum laki-laki.

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk sebesar 33.710.051 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 16.499.377 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 17.210.674 jiwa. Dilihat dari komposisi tersebut penduduk perempuan lebih mayoritas hal ini menjadi alasan penting manakala perhatian kepada perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan semestinya harus selalu responsif gender. Komposisi tersebut bisa dilihat dalam diagram berikut ini.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Namun demikian dalam implementasinya masih terdapat kekurangan seperti: (1) data pilah belum tersedia; (2) kemampuan perencana dalam menyusun analisis gender masih kurang; (3) RPJMD belum mencantumkan indikator dan target kinerja responsif gender serta belum terukur; (4) tim verifikasi tidak konsisten dan kurang maksimal dalam memverifikasi GAP, GBS dan RKA; (5) belum ada Panduan Teknis dan instrumen monitoring dan evaluasi, serta belum pernah dilaksanakan monitoring dan evaluasi PPRG sampai dengan implementasi; (6) kurangnya jumlah fasilitator terlatih.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara sistematis, maka sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG di Provinsi Jawa Tengah.

Maksud dari Panduan Teknis Pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan panduan bagi perangkat daerah dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, memeriksa dan menyusun laporan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Tujuan yang diharapkan dari Panduan Teknis Pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah di Jawa Tengah adalah meningkatkan pemahaman, kemampuan dan ketrampilan SKPD dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, mengimplementasikan, memantau, memeriksa dan melaporkan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/002512 Tanggal 18 Februari 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif (PPRG) di SKPD Provinsi Jawa Tengah dan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Maka perspektif gender juga diintegrasikan ke dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 903/016298 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-RSD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. Integrasi gender ke dalam Surat Edaran Gubernur tersebut tertuang dalam bab tersendiri tentang Anggaran Responsif Gender (ARG), yang didalamnya diatur, antara lain :

Setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah:

- 1) Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender, yaitu :
 - Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan target pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's/Tujuan Pembangunan Millenium) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015;
 - Program/Kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan;

- Program/kegiatan pada huruf a dan b program/kegiatan yang berkelanjutan.
- 2) Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipatif, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program/kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Melakukan analisis gender terhadap program /kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja output dan outcome, yang terukur dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP).
- 4) Menyusun Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA SKPD responsif gender Tahun Anggaran 2014.
- 5) Seluruh SKPD agar melengkapi RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*).
- 6) Kepala Bappeda selaku Ketua dan Kepala BP3AKB selaku Sekretaris kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan asistensi penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) dan RKA SKPD yang responsif gender sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi sangat memperhatikan gender dalam setiap kegiatan pembangunan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestariannya, hal ini tergambar dalam dalam peraturan kebijakan yang sangat responsive gender.

Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kota Semarang

Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang baik bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang berkembang berkisar dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai pendekatan Women In Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan nasional.

Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian. Pendekatan Women In Development partisipasi perempuan dalam pembangunan mensyaratkan adanya kemampuan teknis dan profesional yang dibutuhkan. Ini berarti bahwa potensi dan kapabilitas teknis kaum perempuan harus ditingkatkan melalui (1) upaya mengintegrasikan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa banyak mempersoalkan sumber-sumber yang menyebabkan mengapa perempuan dalam masyarakat bersifat inferior, sekunder dan dalam hubungan subordinasi terhadap laki-laki. Indikator integrasi perempuan dalam pembangunan diukur dari TPAK perempuan, akses pendidikan, hak-hak politik, kewarganegaraan dan sebagainya, (2) menempatkan perempuan sebagai pelaku penting dalam masyarakat sehingga posisi perempuan akan menjadi lebih baik, asumsinya perempuan telah dan selalu menjadi bagian dari pembangunan nasional, dan (3) konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan harapan serta mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan rendahnya kedudukan dan status perempuan harus dihilangkan.

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pembangunan yang berdimensi gender yang bersifat eksploitatif atau merugikan, menjadi hubungan yang seimbang, selaras dan serasi. Sehingga konsep pemberdayaan tenaga kerja perempuan yang akan datang mencakup tiga hal yakni (1) Capacity Building, upaya membangun kemampuan kaum perempuan, (2) Cultural Change, perubahan-perubahan budaya yang memihak kepada kaum perempuan dan (3) Struktural Adjustment, penyesuaian terhadap struktural yang juga memihak kepada kaum perempuan. Maka keberhasilan konsep ini akan menjadi motivasi dan prestasi bagi kaum perempuan dalam pembangunan menuju kesuksesan, karena menurut Mc Cleland (1961) melalui teori Need for Achievement, mengungkapkan bahwa kegagalan pembangunan disebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi untuk berprestasi. Kesuksesan peran kaum perempuan dalam pembangunan bangsa ini akan mempengaruhi citra positif kaum perempuan di hati manusia.

Pada saat pembangunan pada masa Orde Baru, pengembangan masyarakat mengambil posisi dan kontribusi penting. Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian karena kendali pembangunan banyak berasal dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan (top down). Setelah Orde Baru berakhir dan Era Reformasi dimulai, dimana kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) menjadi unsur primadona, setidaknya dalam wacana pembangunan, tema-tema, seperti pemberdayaan, penguatan kapasitas, kelembagaan lokal, kearifan lokal, modal sosial, dan inisiatif local terus bergema dan mewarnai diskusi akademik mengenai pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Kemiskinan di perkotaan, termasuk di Kota Semarang adalah salah satu masalah sosial yang hingga kini tetap sulit terpecahkan, dan bahkan nyaris untuk dapat diselesaikan hanya dalam hitungan satu-dua atau bahkan lima tahun anggaran. Sebagai kota yang tumbuh menjadi mega-urban, terbukti perkembangan kota Semarang itu ternyata tidak selalu paralel dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan kendati sering di dengung-dengungkan bahwa program pembangunan kota yang dilaksanakan senantiasa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidak merataan, namun akibatnya justru menyebabkan putusnya ikatan masyarakat yang lemah dan bahkan substansi dari berbagai kebijakan pemerintah kota cenderung bertentangan dengan golongan masyarakat miskin di kota.

Kota Semarang dalam pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) terdiri dari Focal Point PUG yaitu aparat SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG yaitu wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Sebagaimana Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 dinyatakan dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Focal Point PUG Kota Semarang sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

Pelaksanaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh SKPD maupun oleh Tim Penggerak PKK Kota Semarang. Menurut Walikota Semarang bentuk dukungan Pemerintah kota terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG) dan penancangan Semarang sebagai kota layak anak, fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/meminimalisasir kematian Ibu dan bayi.

Selain itu, berupa kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender, antara lain melalui bentuk pelatihan dan pemberian bantuan alat terhadap 4 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) serta koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan di Kota Semarang. Meliputi PKK, DWP, GOW, GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia).

Kota Semarang juga memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Gender (PPT SERUNI) yang merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang, yang mengandung arti Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani disingkat "SERUNI", lahir tanggal 1 Maret 2005 hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang diselenggarakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, Praktisi dan Aktifis Perempuan.

PPT SERUNI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang, dan dikukuhkan oleh Bapak Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2005 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tahun 2009 Surat Keputusan tersebut telah diperbaharui karena banyak anggota Tim yang Purna Tugas, sehingga SK Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang telah diganti dengan Surat Keputusan No. 463/A. 023 tanggal 12 Pebruari 2009.

Tahun 2011 Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang telah diganti lagi dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011. Tujuan didirikan Seruni adalah :

- a. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak;

- b. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya;
- c. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak;
- d. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/Shelter bagi korban yang terancam jiwanya;
- e. Melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT SERUNI untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking lebih efektif.

Program kegiatan layanan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan trafficking meliputi :

- a. menerima pengaduan dan registrasi korban;
- b. melakukan konseling awal;
- c. memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya;
- d. memberikan pendampingan yang diperlukan korban, layanan medis, psikologis, rohani, psikososial;
- e. mengadakan rapat kasus;
- f. merujuk kasus kepada anggota tim;
- g. melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran secara on air, penyebaran leaflet melalui email, website, dan penyebar luasan berita melalui mass media agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan trafficking serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender;
- h. mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- i. membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan.

Dalam menguraikan capaian peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Kota Semarang tidak bisa lepas dengan data yang bersumber dari SIM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Semarang 2014. Maka uraian berikut berdasarkan sumber data tersebut dengan direkap berdasarkan kegiatan / siklus di PNPM Mandiri Perkotaan. Data telah dipilah dan diolah disesuaikan dengan peran / partisipasi perempuan. Peran atau partisipasi perempuan dalam PNPM MP dapat dimaknai sebagai pelaku kegiatan, anggota kelembagaan ataupun panitia kegiatan. Dan juga sebagai peserta kegiatan ataupun pertemuan / kegiatan PNPM MP dilevel basis, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota bahkan tingkat Provinsi. Capaiannya seperti tergambar dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel : Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Sosialisasi, Pertemuan, Panitia/Tim) Kota Semarang 2014

NO	SIKLUS / Kegiatan	PESERTA				
		Lk	Pr	M	Total	%Pr
1	REFLEKSI 3 TAHUNAN BASIS	1,097	1,112	1,034	2,209	50%
2	REFLEKSI 3 TAHUNAN KELURAHAN	494	413	394	907	46%
3	KBK	401	397	358	798	50%
4	FGD REFLEKSI KEMISKINAN BASIS	1,157	1,211	1,162	2,368	51%
5	FGD REFLEKSI KEMISKINAN KELURAHAN	702	659	654	1,361	48%
6	TIMPS	158	116	120	274	42%
7	FGD KELEMBAGAAN DAN KEPIMPINAN	1,672	1,683	1,569	3,355	50%
8	PELAKSANAAN PS BASIS	1,168	1,222	1,166	2,390	51%
9	PELAKSANAAN PS KELURAHAN	672	694	646	1,366	51%
10	PEMBENTUKAN UPL	15	1	5	16	6%
11	PEMBENTUKAN UPS	6	12	9	18	67%
12	PEMBENTUKAN UPK	8	15	11	23	65%
13	PEMBENTUKAN PENGAWAS UPK	15	9	7	24	38%
14	SOSIALISASI PJM PRO (FASKEL)	282	195	222	477	41%
15	PEMBENTUKAN TIM PP	197	153	157	350	44%
16	BIMBINGAN TEKNIK PP	153	120	128	273	44%
17	LOKAKARYA TINGKAT KEL/DESA	266	209	204	475	44%
18	PENYUSUNAN DRAF PJM PRO	188	154	144	342	45%
19	KONSULTASI PJM PRO TK KELURAHAN	419	379	374	798	47%
20	PERTEMUAN UTK MENYEMPURNAKAN PJM PRO	289	246	239	535	46%
21	SOSIALISASI DOKUMEN	263	206	223	469	44%
22	TINJAUAN PARTISIPASI INTERNAL	2,119	1,806	1,780	3,925	46%
23	TINJAUAN PARTISIPASI EKSTERNAL	1,253	1,264	1,193	2,517	50%
24	REMBUJ WARGA TAHUNAN (RWT)	1,089	864	922	1,953	44%

Dengan mencermati tabel peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin terutama terkait keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosialisasi, pertemuan dan kepanitiaan atau tim yaitu rata-rata capaiannya sudah diatas 40% kecuali pada kegiatan pembentukan UPL (Unit Pengelola Lingkungan) masih sangat minim keterlibatan perempuan dalam ikut serta pembentukan UPL yaitu 6%. Hal ini sangat kontradiktif dengan kegiatan pembentukan UPS (Unit Pengelola Sosial) perempuan yang berperan 67% dan kegiatan pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) perempuan yang berpartisipasi 65%. Dan keikutsertaan perempuan di tingkat basis sangat menggembirakan yaitu terlihat dalam kegiatan pemetaan swadaya (PS) di level basis keterlibatan perempuan sebesar 51% dibandingkan laki-laki 49%. Demikian pula di level basis keterlibatan perempuan dalam kegiatan FGD (Focus Group Discussion) RK (Refleksi Kemiskinan) juga sangat baik yaitu 51%. Hal ini berarti peran perempuan dalam ikut serta mendiskusikan dan memikirkan penanggulangan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat miskin jelas sangat peduli sejak dari level basis.

Tabel : Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Sebagai Anggota UPK, UPL, UPS Dan Pengawas UPK) Kota Semarang 2014

NO	SIKLUS / Kegiatan	PESERTA				
		Lk	Pr	M	Total	%Pr
1	SOSIALISASI RNC/KEGIATAN TP	18,102	21,126	17,456	39,228	54%
2	PEMBENTUKAN TIM TP	3,921	2,594	2,846	6,515	40%
3	TINJAUAN PARTISIPATIF INTERNAL	20,753	14,552	15,013	35,305	41%
4	TINJAUAN PARTISIPATIF EKSTERNAL	11,728	12,273	11,211	24,001	51%
5	KOMUNITAS BELAJAR KELURAHAN (KBK)	3,664	2,997	2,792	6,661	45%
6	ANGGOTA UPL	282	84	114	366	23%
7	ANGGOTA UPS	115	144	57	259	56%
8	ANGGOTA UPK	105	211	69	316	67%
9	PEMBENTUKAN PENGAWAS UPK	197	45	27	242	19%
10	PELAKSANAAN RW	15,926	10,961	12,029	26,887	41%

Tabel tersebut diatas menggambarkan peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin sebagai anggota UPK, anggota UPL, anggota UPS dan Pengawas UPK di Kota Semarang. Yang sangat menonjol peran perempuan sebagai anggota UPK (Unit Pengelola Keuangan) yaitu 67% kemudian peran perempuan sebagai anggota UPS yaitu 56%. Sedangkan peran perempuan sebagai anggota UPL yaitu 23% masih termasuk cukup baik karena yang ditangani atau dikelola di UPL lebih banyak infrastruktur sehingga perempuan masih merasa kurang memiliki kapasitas untuk bidang itu.

Tabel : Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Pemilu BKM / LKM Dan Anggota BKM / LKM) Kota Semarang 2014

NO	PEMLUBKM / LKM	Anggota				
		Lk	Pr	M	Total	%Pr
1	SELEKSI UTUSAN MASYARAKAT - JML PESERTA PEMILU BASIS	138,237	115,646	108,279	253,883	46%
2	SELEKSI UTUSAN MASYARAKAT - JML UTUSAN BASIS	14,296	7,922	8,719	22,218	36%
3	PEMLU LULU LUKM / KMTK KELURAHAN	8,938	5,357	5,880	14,295	37%
4	JML ANGGOTA LKM	1,499	560	419	2,059	27%

Melihat tabel peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam ikut serta Pemilu BKM / LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan terpilih menjadi anggota BKM / LKM menunjukkan bahwa di Kota Semarang, perempuan yang terlibat langsung dalam pemilu BKM / LKM yaitu 37%. Hal ini berarti peran perempuan dan kepedulian perempuan dalam ikut membangun wadah kelembagaan sebagai sarana penanggulangan kemiskinan di perkotaan sudah cukup baik. Apalagi bila dilihat keterlibatan langsung perempuan sebagai anggota pengurus BKM ? LKM yang merupakan wadah penanggulangan kemiskinan yaitu sebesar 27%. Hal ini berarti perempuan di Kota Semarang cukup memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan.

Tabel : Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Sebagai Anggota KSM Dan Relawan) Kota Semarang 2014

NO	KSM PEREMPUN & Relawan	Anggota				
		Lk	Pr	M	Total	%Pr
1	KSM PEREMPUN	3,970	4,281		8,251	52%
2	RELAWAN	1,887	1,220		3,107	39%

Keterlibatan perempuan atau peran perempuan diperjelas lagi dengan jumlah anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Perempuan yang memberikan kontribusi penuh pada pemberdayaan perempuan atau masyarakat miskin di perkotaan. Dengan adanya anggota KSM Perempuan salah satunya bisa mengakses perempuan lainnya yang sulit dijangkau atau didekati untuk pemberdayaannya. Jumlah anggota KSM Perempuan PNPM MP Kota Semarang yaitu 52%. Jumlah ini belum termasuk KSM yang diluar binaan PNPM MP sehingga hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan cukup baik walaupun masih tetap didorong terus untuk berkembang. Disamping itu dalam tabel tersebut terlihat jumlah perempuan yang menjadi Relawan penanggulangan kemiskinan (pemberdayaan masyarakat) yaitu sebesar 39%. Hal ini berarti perempuan di Kota Semarang mau dan mampu peduli terhadap pemberdayaan masyarakat miskin walaupun rela tidak dibayar tetapi hatinya tetap tergerak untuk peduli terhadap sesama masyarakat.

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotipe, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi (1) sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan (2) sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan (3) hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan (4) upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan (5) faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan (6) bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan. Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini.

Salah satu indikator integrasi perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan disemua bidang lapangan kerja sebagai politikus, PNS, karyawan, buruh perusahaan termasuk petani, hingga tahun 1998 saja mencapai 40,2 persen. Kondisi ini dapat dipahami begitu besar andil perempuan dalam pembangunan nasional yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun Women In Development Approach (WIDA) yang diperkenalkan oleh United States Agency for International Development (USAID) bahwa perempuan merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Ini berarti bahwa perempuan dan pembangunan telah menjadi sorotan dunia internasional termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kajian yang lebih komprehensif.

Hubeis (1985) mengatakan, analisis alternatif peran perempuan dalam mendorong pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek yakni (1) peran tradisi atau peran domestic yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang berhasil mengelola rumah tangga dengan baik akan menjadi inspirasi dan motivator bagi pelaku pembangunan, (2) peran transisi yang berkaitan dengan garapan lahan pertanian atau bekerja di usaha keluarga dan (3) peran kontemporer. Perempuan memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa.

Demikian pula dari paparan tentang peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, perempuan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan manusia yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang yang cenderung meningkat dari tahun 2009 (76,90) sampai pada tahun 2013 (78.54). Perempuan juga mempunyai kontribusi dalam pembangunan gender yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu cenderung meningkat pada tahun 2009 (71,42) sampai pada tahun 2013 (73.74). Dan kontribusi peran perempuan dalam pemberdayaan gender terlihat dalam capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu menunjukkan kecenderungan meningkat pula pada tahun 2009 (63,19) sedangkan pada tahun 2013 (70.62). Hal ini dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan mempunyai kontribusi yang signifikan dan baik dalam pembangunan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Realitas ini juga dibuktikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kota Semarang demikian juga dalam capaian PNPM MP di Provinsi Jawa Tengah, bahwa peran perempuan dalam setiap kegiatan tahapan/ siklus mempunyai kontribusi yang cenderung signifikan meningkat dan baik dalam ikut menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan. Mengingat pentingnya peran perempuan dalam program PNPM MP mempunyai KPI atau indicator performance atau capaian keberhasilan yang terkait pada peran perempuan dalam setiap kegiatan “pembelajaran kritis” program pemberdayaan masyarakat.

Karena peran perempuan menjadi indikator capaian kinerja atau tolok ukur keberhasilan program maka dalam setiap langkah kegiatan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan harus berdasarkan indikator tersebut. Ukuran kinerja tersebut yaitu :

1. Tingkat partisipasi perempuan dalam serangkaian proses rebug warga selama pelaksanaan PNPM-MP minimal sebesar 30 %
2. % wanita / perempuan yang terpilih sebagai anggota BKM/LKM sebesar 20%
3. % wanita / perempuan sebagai penerima manfaat pinjaman dana bergulir sebesar 30 %
4. % wanita / perempuan sebagai penerima dana hibah (program sosial)
Sebesar 30 %
5. % wanita / perempuan sebagai anggota KSM sebesar 30 %

Apabila dicermati dari indikator tersebut menunjukkan peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM MP) di Kota Semarang dari semua indikator tersebut telah tercapai bahkan melampaui, hal ini membuktikan bahwa peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya sebagai penonton yang selama ini menjadi pandangan awam. Capaian peran atau partisipasi perempuan dalam keaktifan setiap pertemuan / FGD dari basis sampai tingkat Kelurahan mencapai hampir 51 % melampaui target indikator keberhasilan (KPI) hanya 30%. Demikian pula dilihat dari keterlibatan perempuan dalam BKM / LKM yaitu wadah atau lembaga yang mengelola program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan / Desa, perempuan di Kota Semarang mempunyai kontribusi mencapai 27 % lebih tinggi dari target KPI sebesar 20%. Khusus peran perempuan dalam wadah BKM/ LKM ini merupakan hal yang sangat strategis karena perempuan dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait pemberdayaan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan perkotaan di desa atau kelurahan masing-masing.

Lebih rinci lagi keterlibatan perempuan dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang menjadi sasaran sekaligus subjek atau pelaku dari pemberdayaan masyarakat. Di Kota Semarang peran perempuan menjadi anggota KSM mencapai 52% lebih tinggi dari target indikator keberhasilan yaitu 30%. Disinilah peran perempuan lebih terlihat dan langsung menjadi tindakan secara nyata dari masyarakat miskin tak berdaya menuju masyarakat berdaya yang sejahtera. KSM akan mendapatkan peningkatan kapasitasnya sehingga perempuan yang menjadi anggota kelompok pengetahuan, ketrampilan, manajemen keuangan, kewirausahaan dan lainnya yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat miskin atau belum berdaya. Hal ini juga ditentukan dari keaktifan perempuan sebagai anggota KSM, sehingga KSM tersebut cepat berkembang dari yang belum berdaya menjadi berdaya dan menjadi KSM mandiri yang memiliki peluang potensi untuk memperoleh dukungan pendanaan yang lebih besar berupa kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan dan membantu KSM untuk berkembang.

Hal ini menunjukkan peran perempuan sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan bahkan ujung tombak atau sebagai subyek / pelaku bukan hanya obyek program. Perempuan harus dapat menduduki porsi yang sama dengan laki-laki dalam upaya penanggulangan kemiskinan / pemberdayaan masyarakat. Dan beberapa pengalaman dapat diambil hikmahnya bahwa perempuan mempunyai sifat ketelitian, rajin, disiplin, bekerja ulet, sabar, dan menjadi sentra keluarga dalam pembelajaran / pendidikan keluarga. Sehingga sangat wajar apabila perempuan mewarnai dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang penuh dengan proses pembelajaran kritis masyarakat. Dan hal ini membutuhkan sosok perempuan untuk terlibat secara optimal dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan.

Maka realitas peran perempuan ini sesungguhnya untuk menepis anggapan selama ini antara lain :

- a. Karena konstruksi sosial budaya *gender*, seorang laki-laki misalnya haruslah bersifat kuat, agresif, rasional, pintar, berani dan segala macam atribut kekelakian lain yang ditentukan oleh masyarakat tersebut, maka sejak seorang bayi laki-laki lahir, dia sudah langsung dibentuk untuk "menjadi" seorang laki-laki, dan disesuaikan dengan atribut-atribut yang melekat pada dirinya itu. Demikian pula halnya dengan seorang perempuan yang karena dia lahir dengan jenis kelamin perempuan maka dia pun kemudian dibentuk untuk "menjadi" seorang perempuan sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam suatu masyarakat dan budaya dimana dia lahir dan dibesarkan, misalnya bahwa karena dia dilahirkan sebagai seorang perempuan maka sudah menjadi "*kodrat*" pula bagi dia untuk menjadi sosok yang cantik, anggun, irrasional, emosional dan sebagainya.

- b. Pemapanan citra bahwa seorang perempuan itu lebih cocok berperan sebagai seorang ibu dengan segala macam tugas domestiknya yang selalu dikatakan sebagai “urusan perempuan”, seperti membersihkan rumah, mengurus suami dan anak, memasak, berdandan dan sebagainya. Sementara citra laki-laki, disosialisasikan secara lebih positif, dimana dikatakan bahwa laki-laki karena kelebihan yang dimilikinya maka lebih sesuai jika dibebani dengan “urusan-urusan laki-laki” pula dan lebih sering berhubungan dengan sektor publik, seperti mencari nafkah, dengan profesi yang lebih bervariasi daripada perempuan. Kesemua itu disosialisasikan sejak dari kelas satu Sekolah Dasar melalui buku-buku pelajaran di sekolah hingga Panca Dharma Wanita, yang menyatakan bahwa tugas utama seorang perempuan adalah sebagai “pendamping” suami, dan itulah yang diyakini secara salah oleh sebagian orang sebagai “kodrat wanita.”

Daftar Referensi

- Abdurrahman Mustofa dan Soekartawi., *Masalah Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Makalah., tt,tth. 1999
- Bakhit, Izzadin et. all, *Attacking The Roots of Poverty*, Yakoma-PGI, Jakarta,1996
- Bambang Rudito. Arif Budimanta, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development Cetakan Pertama*. ICSD & FKPM, 2003
- Bintarto, interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta ,1989
- Ditjen Cipta Karya (2009),*Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*,Jakarta
- DPU,Ditjen Cipta Karya (2008-2010), *Modul-modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, TOT Pemandu Nasional PNPM Mandiri Perkotaan*,Jakarta
- Fakih, Mansour 1999. Analisis Gender dan transformasi sosial.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gunawan Sumodiningrat (1997). *Pembngunan Daerah dan pemberdayaan Masyarakat* ,PT Bina Rena Pariwara, jakarta
- Gunawan Sumodiningrat (2009) (editor : Aribowo Suprajitno Adhi). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa,Menanggulangi Kemiskinan dengan prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo /Gramedia, Jakarta
- Gunawan Sumodiningrat (1999),*Agenda Pemulihan Ekonomi, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui pemberdayaan dan otonomi daerah* ,Kipas Putih Aksara, Jakarta
- Hakeem, Ali Hosein. *Membela Perempuan Menalar Feminisme dengan Nalar Agama*. 2005. Al-Huda: Jakarta.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto, (ed). *Wanita dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998
- Illich, Ivan. *Matinya Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Kartsasmita, Ginanjar; *Pembangunan Untuk Rakyat*, SIDES, Jakarta, 1996.
- Khan, *Wahiduddin. Antara Islam dan Barat*. 2001. Serambi: Jakarta.Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan* Jakarta. September 2005
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Korten, DC., 1988, Community Organization and Rural Development ; *A Learning Pricces Approach Publik Administration Review*, Vol 40, No 5, Sept – Oktober : 480 – 511
- Long, N.. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1992
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar, 1996
- Munir, Lily Zakiyah, (ed). *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan, 1999
- Noor, H. M. Arifin, Drs. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia, 1997

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

- Murniati, Nunuk P. 2004 *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Prespektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*. Buku II. Magelang: Indonesia Tera.
- Nasikun, Dr, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, PT Tiara Wacana Jakarta, 1996
- Nugroho, Riant 2008 *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nurdin Widodo Dan Suradi. *Penelitian Profil Dan Peranan Organisasi Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat*.
- Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, *Buku Pedoman Umum cetakan pertama*. Jakarta September 2004
- Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, *Buku Pedoman Umum cetakan revisi*. Jakarta September 2002
- Romani. 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Siahaan, H.M. 1993. *Dimensi Struktural dan Kultural Kemiskinan Pedesaan* Surabaya Post, Senin, 3 Maret 1993.
- Soelaeman, M. Munandar. Ir. MS. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 1998
- Stowasser, Barbara Freyer. *Reinterpretasi Gender*. 2001. Pustaka Hidayah: Bandung.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*. Jakarta November 2002.
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance*, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
- Sumodiningrat, Gunawan dkk.; *Kemiskinan Teori Fakta dan Kebijakan*, Impac, Jakarta,
- Surapaty, Surya Chandra "Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Nasional", dalam www.pdiperjuangan.or.id. Di akses pada tanggal 5 September 2012.
- UNDP (2007), *Memberdayakan Masyarakat dengan Mendayagunakan Telecenter*, Panduan Untuk Fasilitator Infomobilisasi, Jakarta.